

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN TABALONGKALIMANTAN SELATAN

Erwan¹

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong -
Kalimantan Selatan**

erwanmardani66@gmail.com

Abstrak

Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi merupakan program yang bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan berbasis pada sumberdaya lokal, pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, perbaikan pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengevaluasi dan menilai efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tabalong, terutama pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Tabalong; (2) Menemukan faktor-faktor yang terpengaruh dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong; (3) Merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di Kabupaten Tabalong khususnya maupun wilayah lainnya pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis evaluasi formatif untuk mengukur evaluasi dan efektifitas pelaksanaan PNPM-PISEW di KSK Tabalong. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM-PISEW menunjukkan bahwa program ini telah dapat dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan yang cukup baik. Penilaian dari prinsip dasar program, yaitu: transparansi dan akuntabel, demokratis, partisipasi, kesetaraan gender, kolaboratif, dan keberlanjutan secara keseluruhan cukup efektif. Kekurangan dari pelaksanaan program ini adalah partisipasi perempuan yang masih minim dan keberlanjutan program yang belum dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. Faktor-faktor yang terpengaruh dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di KSK Tabalong adalah terjadinya peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan desa.

Kata Kunci: PNPM-PISEW, KSK, Evaluasi, Efektifitas, Tabalong

Pendahuluan

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan penelitian yaitu mengangkat persoalan efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Sosial-Ekonomi Wilayah (PNPM-

PISEW) di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Program PNPM-PISEW dilaksanakan di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2008 sampai tahun 2015.

Tujuan pelaksanaan PNPM-PISEW ini adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi perdesaan di Kabupaten Tabalong.

Dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong ternyata belum berjalan dengan efektif di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kecamatan Jaro, Muara Uya dan Haruai. Berdasarkan kenyataan di lapangan, maka diduga ada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PNPM-PISEW tersebut yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Dimana dalam hal ini juga didasari oleh angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 28,55 juta jiwa atau 11,47% dari 248,8 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Artinya, satu dari sembilan orang adalah orang miskin. Data yang disajikan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2000-2015, jumlah penduduk miskin berfluktuasi dan lebih banyak berada di perdesaan. Belum meratanya pembangunan, terutama kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dan lapangan pekerjaan di perdesaan menyebabkan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran. Persentase kemiskinan ini terdiri dari 10,63% penduduk perkotaan dan 17,92% penduduk perdesaan (BPS, 2016). Sedangkan angka pengangguran pada tahun yang sama mencapai sebesar 7,39 juta jiwa dari total angkatan kerja sebesar 118,19 juta jiwa.

Kemiskinan dan pengangguran sangat erat kaitannya . Arsyad (1997) berpendapat bahwa penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau yang hanya bekerja secara *part-timer*, berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas dan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan masuk kategori miskin.. Namun, kadangkala terdapat pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama halnya dengan banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan sedikit.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Di Indonesia Tahun 2000-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Jumlah Pengangguran (juta orang)
		Kota	Desa	Kota+Desa	
1	2000	17,60	31,90	49,50	5,05
2	2001	15,64	32,33	47,97	6,03
3	2002	12,31	26,43	38,74	5,81
4	2003	8,60	29,27	37,87	8,01
5	2004	13,32	25,08	38,39	9,13
6	2005	12,26	25,08	37,34	9,94
7	2006	11,37	24,78	36,15	10,25
8	2007	12,40	22,70	35,10	11,90

9	2008	14,49	24,81	39,30	10,93
10	2009	13,56	23,61	37,17	10,01
11	2010	12,77	22,19	34,96	9,39
12	2011	11,91	20,62	32,53	8,96
13	2012	11,10	19,93	31,02	8,32
14	2013	10,95	18,94	29,89	7,70
15	2014	10,51	18,09	28,59	7,24
16	2015	10,63	17,92	28,55	7,39

Sumber: BPS 2016

Sementara itu, Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh menurut Octaviani, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, maka pengangguran dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran cenderung semakin meningkatkan angka kemiskinan. Namun kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya pendapatan atau hilangnya pekerjaan seseorang, karena kemiskinan bersifat kompleks dan bersifat multidimensional.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah masih terjadinya ketimpangan pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih yang terjadi antar wilayah. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2013), bahwa angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan wilayah sangat erat kaitannya dengan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia. Keragaman

kualitas sumberdaya manusia ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan kemiskinan. Perbedaan tingkat produktivitas sumberdaya manusia dan kemiskinan antar wilayah pada akhirnya akan mendorong terjadinya kesenjangan antar wilayah yang semakin besar dan merupakan ancaman bagi pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, angka kemiskinan yang masih tinggi dan besarnya kesenjangan antar wilayah di Indonesia mendorong pemerintah untuk terus berupaya menanggulangi kemiskinan¹.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pro rakyat, seperti program penanggulangan kemiskinan berupa penyaluran beras untuk orang miskin atau dikenal sebagai Program Raskin, berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti program Jamkesmas, Jamkeskin, Program Bantuan Langsung Tunai, dan berbagai program social safety nett lainnya. Demikian juga terdapat program penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan proyek padat karya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, seperti halnya program PDMDKE, Program IDT, Program P3DT, dan juga program pengembangan kecamatan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan baik oleh Pusat maupun Provinsi bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, menunjukkan efektivitas yang lebih baik. Dasar pemikirannya adalah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan langsung, tetapi masyarakat juga harus berdaya dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan serta terlibat dalam upaya pembangunan, minimal dengan memberikan aspirasinya.

¹Analisis Kesenjangan Antarwilayah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2013

Kesadaran bahwa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat harus ditempatkan pada posisi yang strategis (Yustika, 2003) menimbulkan keyakinan bahwa keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan sangat menentukan keberhasilan atau keberlanjutan suatu kegiatan (Sofhani, 2002). Briant and white (1987) menegaskan bahwa pendekatan terhadap masyarakat dalam konsep pemberdayaan mempunyai makna bahwa masyarakat tidak hanya sekedar dijadikan obyek semata, melainkan juga sebagai subyek dari upaya pembangunan. Sementara itu rendahnya kapasitas fiskal menyebabkan ketidakmampuan daerah menyelenggarakan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan masyarakat dan *sharing* anggaran antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam program pembangunan inilah yang melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat.

Program berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya telah lama dilaksanakan pemerintah, mulai dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1994 yang dilanjutkan dengan program-program serupa, seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dan terakhir adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PISEW merupakan salah satu program inti dari PNPM Mandiri karena memiliki kriteria dan berorientasi pada konsep *Community Driven Development* (CDD) dan *Labor Intensive Activities* (LIA). PNPM-PISEW mempunyai tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan

berbasis pada sumber daya lokal, pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, perbaikan pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa (*local governance*) serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.

PNPM-PISEW telah melakukan tahap perencanaan program, baik ditingkat pusat maupun daerah pada tahun 2008. Secara teknis, guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan PNPM-PISEW, arah pengembangannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar perdesaan, pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS), meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui pengembangan strategi pelatihan pengelolaan pembangunan secara administratif serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari 35 kabupaten pelaksana lanjutan dari PNPM-PISEW jilid II ini yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 26 Miliar untuk 10 kecamatan. Sedangkan KSK dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu Jaro, Muara Uya dan Haruai yang mendapatkan dana masing-masing 2 Miliar untuk program pengembangan sosial ekonomi guna menghidupkan kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan. Pemilihan kawasan ini sebagai kawasan strategis karena mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Kawasan Strategis ini telah dilegalisasi berdasarkan Perda Nomor 19 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tabalong pada pasal 38 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: c. Kawasan perkebunan dan peternakan sapi, meliputi Kecamatan Jaro, Muara Uya, dan Haruai”. Sebagai kawasan strategis,

ketiga kecamatan ini memiliki potensi dan prospek yang bisa dikembangkan, seperti karet dan sapi untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Melalui PNPM-PISEW, perkembangan komoditi unggulan di KSK Tabalong mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2009-2015, dimana terdapat peningkatan luas lahan tanam perkebunan karet sebesar 19.228 ha menjadi 20.787 ha, peningkatan produksi sebesar 13.539 ton/tahun menjadi 20.268 ton/tahun, dan peningkatan produktifitas sebesar 0,704 ton/ha/tahun menjadi 1,1 ton/ha/tahun. Sedangkan komoditas sapi juga mengalami peningkatan populasi ternak sebesar 3.248 ekor/tahun menjadi 3.355 ekor/tahun².

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Jangka Menengah Pemberdayaan Sosial Ekonomi-Kawasan Strategis Kabupaten (PJM PSE-KSK) Kabupaten Tabalong tahun 2013-2017, ditargetkan kenaikan rata-rata produksi komoditas karet sebesar 10% per tahun dan kenaikan rata-rata komoditas sapi sebesar 4% per tahun. Guna merealisasikan target capaian tersebut, perlu strategi kebijakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Tentunya pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong perlu dievaluasi untuk menilai sejauh mana tingkat ketercapaian program tersebut terhadap pengurangan kemiskinan dan pengembangan KSK.

Evaluasi pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari proses yang dilakukan setelah perumusan program/kebijakan, implementasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut. Kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2009) ditetapkan menjadi tolok ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Kriteria tersebut meliputi : efektifitas (*effectiveness*), efisiensi

²Materi Rapat Koordinasi PNPM-PISEW Kabupaten Tabalong, November 2015

(efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (resvonsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Dalam penelitian disertasi ini peneliti menetapkan fokus pada efektivitas pelaksanaan program, yang didalamnya telah mencakup 5 indikator utama yaitu transparansi dan akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, kesetaraan gender, dan keberlanjutan program (Indikator Kinerja Program PNPM-PISEW menurut UU No.26/2007).

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 1997). Karena itu istilah-istilah tersebut kadang-kadang diberi makna yang sama, tetapi juga sering dibedakan, tergantung konteks yang sedang dibahas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (1975) memberi makna kebijakan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana tertentu (Wahab, 1997). Kebijakan pada intinya sebagai pedoman untuk bertindak.

Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh PBB tersebut di atas, Fredrick (dalam Islamy, 1997) memberikan pengertian kebijakan, sebagai "a proposed course of action of person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach anak goal or relevan objective or purpose" (... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

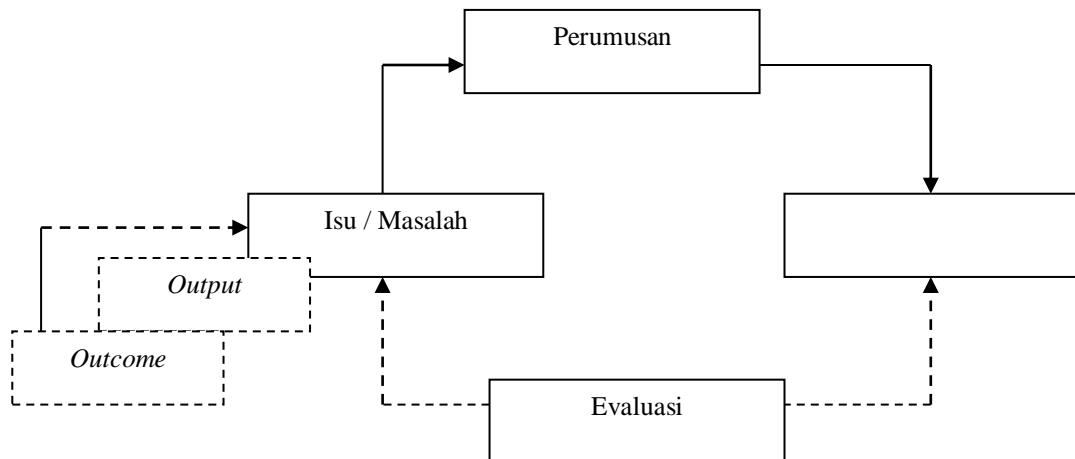
Pengertian lain yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Islamy, 1997) bahwa kebijakan itu adalah "A purposive course of action followed by action or set actors in dealing with a problem or matter of concern" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Easton (dalam Wahab, 1989) mengemukakan secara singkat bahwa kebijakan adalah "A policy ...consist of web of decisions and actions than allocate values" (suatu kebijakan ... terdiri atas serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai).

Implementasi Kebijakan Publik

Permasalahan yang paling krusial tentang kebijakan publik di Indonesia adalah seringkali tergesa-gesa dalam proses perumusannya (Islamy,1997), kurang dipersiapkan secara matang,terutama dalam tahapan agenda setting-nya. Masalah lain adalah lemahnya kesiapan dalam proses implementasinya , terutama kurang dalam hal proses sosialisasi dan lemah dalam proses evaluasinya ketika sebuah kebijakan publik telah diimplementasikan.

Dalam sebuah proses kebijakan publik yang ideal mencakup siklus skematik , yang pada intinya terdiri dari tiga bagian, yaitu: tahap perumusan kebijakan publik, tahap implementasi kebijakan publik, dan tahap evaluasi kebijakan publik. Tahap evaluasi ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan publik berikutnya.

Gambar 2.1 Siklus Skematik Kebijakan Publik



Sumber: Riant Nugroho D. (2003:73).

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa proses kebijakan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama dan biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang per-orang dan memang harus diselesaikan. Isu seperti ini dapat diangkat sebagai agenda politik untuk segera diselesaikan.
- b. Isu strategis semacam ini kemudian diangkat oleh pemerintah sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi negara dan seluruh warganya termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan, baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan apakah kebijakan

tersebut telah diimplementasikan secara baik dan benar pula.

- e. Evaluasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, terhadap isi kebijakan itu sendiri maupun evaluasi terhadap manfaat langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan terutama oleh kelompok sasaran.
- f. Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak (dampak) kebijakan, terutama dampak yang diharapkan untuk lebih meningkatkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema beserta penjelasannya maka terdapat tiga kegiatan pokok dalam kebijakan publik yaitu, Perumusan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Dimana ketiga kegiatan ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan serangkaian kegiatan yang saling memengaruhi.

Evaluasi Kebijakan

Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya evaluasi kebijakan publik memiliki tiga lingkup makna yaitu, evaluasi terhadap perumusan kebijakan; evaluasi terhadap lingkungan kebijakan, dan evaluasi terhadap proses kebijakan. Hal ini disebabkan karena ketiga domain tersebut akan menentukan apakah sebuah kebijakan berhasil atau tidak. Namun demikian, di dalam konsep evaluasi kebijakan selalu diikuti dengan konsep kinerja, sehingga evaluasi kebijakan publik bermakna kinerja atau capaian apa yang telah diraih setelah sebuah kebijakan diimplementasikan. Hal ini yang menjadikan perbedaan antara evaluasi kebijakan dengan analisis kebijakan. Oleh karena itu juga evaluasi kebijakan publik tidak hanya berkenaan dengan implementasinya tetapi berkaitan juga dengan lingkungan kebijakan dan proses kebijakan itu sendiri.

Dunn (1999) menyamakan istilah evaluasi dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja kebijakan, khususnya evaluasi kebijakan publik.

Di samping itu fungsi evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan, termasuk memberikan umpan-balik guna meningkatkan efektivitas program sehingga mendorong meningkatnya kepuasan publik terhadap implementasi sebuah kebijakan publik.

Para pengambil kebijakan menyadari perlu untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu sesungguhnya berjalan, untuk mengukur keberhasilan dalam kondisi pelaksanaan dan menyelidiki apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan (Wibawa, 1994). Di sisi lain Islamy menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap akibat atau dampak dari suatu kebijakan pemerintah. (Islamy, 1986).

Tahap-Tahap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Gunn (1984) terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Tahap I, terdiri atas kegiatan: (a) mengembangkan rencana suatu program dengan

penetapan tujuan secara jelas; (b) menentukan standard pelaksanaan; dan (c) menentukan cara yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

2. Tahap II, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
3. Tahap III, meliputi kegiatan: (a) menentukan jadwal; (b) melakukan pemantauan; dan (c) mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Dengan demikian, evaluasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan. Disinilah letak perbedaan konsep antara Gunn dengan Mazmanian dan Sabatier. Gunn menitikberatkan pada langkah-langkah/tindakan yang dilakukan oleh agen yang mengimplementasikan kebijakan.

Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan sebuah kebijakan tidaklah selalu berjalan mulus dalam kenyataannya, oleh karena ada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan evaluasi kebijakan. Dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Keadaan ini oleh Dunsire (1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab (1991) dinamakan *implementation gap*. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh William dan Elmore (1976), sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997) disebut sebagai *implementation capacity* dan organisasi atau aktor atau kelompok organisasi yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Secara obyektif, kebijakan negara sebenarnya mengandung risiko untuk

gagal. Pengertian kegagalan kebijakan negara oleh Hogwood dan Gunn (Wahab, 1991) dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) *Non-Implementation* (kebijakan yang tidak terimplementasikan), dan (2) *Unsuccessful Implementation* (kebijakan yang tidak berhasil diimplementasikan).

Tidak terimplementasikan kebijakan dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut: (1) kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana; (2) mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak mau bekerjasama; (3) bekerja tidak efisien; (4) tidak menguasai permasalahan dan diluar jangkauan kekuasaan; dan (5) hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Sedangkan kebijakan yang tidak berhasil diimplementasikan dapat disebabkan karena: (1) kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan; dan(2) kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilah dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini, tidak semuanya program yang diimplementasikan itu benar-benar berlangsung dengan mulus dan efektif. Bahkan ada kalangan yang menyangsikan, bahwa tidak semua program yang diimplementasikan itu dapat berlangsung secara optimal.

Apabila suatu evaluasi pelaksanaan kebijakan mengalami kegagalan, maka dapat menimbulkan pertanyaan seputar sebab mengapa kegagalan itu terjadi. Dengan mengetahui sebab itu, berarti dapat memberi penjelasan tentang titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan implementasinya dapat dikembangkan. Sebab yang mungkin timbul dan menjadi dasar kegagalan implementasi suatu kebijakan publik, tentunya berbeda antara

satu dengan yang lain. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan beberapa aspek, sebagaimana yang dikemukakan oleh Maarse (Sunggono, 1994), yaitu: (1) isi dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan; (2) tingkat informasi dari pelaku yang terlibat; (3) banyaknya dukungan bagi kebijakan yang diimplementasikan; dan (4) pembagian potensi dan peran dalam proses implementasi.

Penilaian Evaluasi Kebijakan

Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

1. ***Fokus Nilai***. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. ***Interdependensi Fakta – Nilai***. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Guna memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

3. ***Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.*** Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*ex-ante*).
4. ***Dualitas Nilai.*** Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain).

Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan

Beberapa ahli mengemukakan tentang tujuan dari evaluasi. Subarsono (2005) merinci beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi dapat diketahui maupun derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisien suatu kebijakan dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat beberapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) berupa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengungkapkan fenomena sosial dari sisi kualitatif, yaitu dari sisi kesadaran yang terlahir dari fenomena yang telah digambarkan itu yaitu fakta dan fenomena yang terkait dengan pelaksanaan PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabalong. Karena Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Indonesia yang ditunjuk sebagai pelaksana lanjutan Program PNPM-PISEW yang pada tahun anggaran 2013/2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 26 miliar untuk 10 kecamatan. Pelaksanaan Program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong dilaksanakan di tiga Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yaitu di Kecamatan Jaro, Muara Uya dan Haruai yang masing-masing mendapatkan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk program pengembangan sosial ekonomi guna menghidupkan kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan.

Kegiatan pengumpulan data pada kegiatan penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan di lapangan terhadap pelaksanaan PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong yang meliputi beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Jaro, Muara Uya dan Haruai. dalam kaitan ini peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW di lokasi, sehingga dari hasil pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai sumber data penelitian.

- Wawancara

Teknik wawancara dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu para pihak yang berwenang dan berkompeten memberikan gambaran dan informasi sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang diwawancarai peneliti dalam hal ini adalah : Bupati Tabalong, Anggota DPRD Tabalong, Sekretaris Daerah Tabalong dan para pengelola PNPM-PISEW.

- Dokumentasi

Adapun teknik dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder melalui sumber-sumber tertulis atau dokumen arsip, data statistik dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu menggunakan data sekunder yang sudah dikumpulkan oleh instansi/unit, dokumen atau arsip resmi yang dikumpulkan pemerintah Kabupaten Tabalong seperti Bappeda Kabupaten Tabalong, Kantor Kecamatan wilayah KSK dan Desa penerima program

- a. Pengumpulan data

Yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian dan dengan mempertimbangkan kondisi di tempat penelitian.

- b. Reduksi data (Data Reduction).

Yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal. pokok difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicarikan pola dan temannya, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap-tahap reduksi data.

Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan program PNPM-PISEW tampak sekali pentingnya kepatuhan masyarakat dalam mendukung setiap kegiatan yang ada. Kepatuhan dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diperlukan dan dipersyaratkan merupakan kunci awal keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Kepatuhan kelompok masyarakat penerima program akan semakin meningkat jika aparatur pemerintah dan fasilitator program menunjukkan kesungguhan dan memiliki kredibilitas sosial dan moral yang baik.

Peran pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa, baik sebagai promotor maupun fasilitator program sangatlah penting. Sinergi dan sinkronisasi program pada ketiga tingkatan pemerintahan daerah tersebut sangat memengaruhi kekompakan dan sinergisitas kerja dari seluruh stakeholder kebijakan.

Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada tahap pelestarian program merupakan faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program PNPM-PISEW. Dukungan dan partisipasi tersebut dapat berupa pemikiran, tenaga, maupun dari segi pendanaan.

Lemahnya sinergi dan keterkaitan antar berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada dalam satu wilayah mendorong tidak adanya keterkaitan strategis antara satu program pemberdayaan dengan program pemberdayaan yang lainnya, sehingga dapat membingungkan para perencana kegiatan dan pada masyarakat penerima program, terutama dalam menentukan segmen kegiatan dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Selanjutnya hal ini menyebabkan lemahnya sinergi antara sasaran program dengan kebutuhan kelompok sasaran, yang pada

akhirnya berpengaruh terhadap tingkat penerimaan kelompok sasaran terhadap program PNPM-PISEW.

Diskusi

a. Efektivitas pelaksanaan suatu program/kebijakan pemberdayaan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Makin tinggi tingkat kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat serta makin terarah dukungan yang diberikan oleh pemerintah akan makin tinggi efektivitas pelaksanaan suatu program.

b. Sinergisitas antar kegiatan, antar peran dan antar program merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan program pemberdayaan untuk memperoleh dukungan aktif masyarakat. Makin jelas dan makin intensif sinergi yang dapat dilakukan akan makin massif dukungan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

c. Model pemberdayaan akan efektif jika mampu menciptakan kolaborasi secara intensif seluruh stakeholder program, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada pelestarian program. Makin intensif dan tepat kolaborasi antar stakeholder program, akan makin efektif program pemberdayaan yang dilakukan.

Kesimpulan

a. Efektivitas pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Tabalong dilihat dari indikator keberhasilan program yang meliputi indikator transparansi, akuntabel, demokratis, keadilan, partisipatif, kesetaraan gender, kolaboratif, dan keberlanjutan, dapat dinyatakan cukup efektif.

- b. Faktor pendorong efektivitas pelaksanaan program PNPM-PISEW di KSK Tabalong adalah kepatuhan masyarakat, dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Sementara faktor penghambatnya adalah masih lemahnya sinergitas program dan rendahnya kemampuan masyarakat.
- c. Model pemberdayaan alternative yang diperkirakan lebih efektif dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah model Collaborative Community Empowerment, suatu model pemberdayaan yang didasarkan pada kolaborasi yang intensif antar stakeholder program mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tingkat pelestarian program.

Daftar Pustaka

- Ala, B. A. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Liberty: Yogyakarta.
- Anderson, dan Jamse, E. 1998. *Public Policy Making: An Introduction*. Houghton Mifflin Company: Boston.
- Antholt, C.H. 2001. *Agricultural Extension in the Twenty-First Century*, dalam Eicher and Staatz kd). 2001. *International Agri-cultural Development*. Third Edition. Johns Hopkins.
- Analisis Kesenjangan Antarwilayah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2013
- Arsyad, L. 1997. *Ekonomi Mikro, BPFE*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Asy'arie. 2001. *Keluar Dari Krisis Multidimensi*. LESFI: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2013.
- Barret, S.M., dan Fudge, C. 1981. *Examining the Policy-Action Relationship*. Metuen Inc.: London.
- Bartle, P. 2003. *Key Word C of Community Development, Empowerment, Participation*: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>.
- Basri, H. 1999. *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan, sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Bina Rena Pariwara: Jakarta.

- Bryant dan White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES: Jakarta..
- Cook, dan James B. 1994. *Community Development Theory*. Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, university of Missouri Columbia.
- Deliveri. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Praktek*, p1, http://www.deliveri.org/gudidelines/how/hm_7/hm_7_summaryi.htm.
- Dillon, H.S. dan Hermanto. 1993. *Kemiskinan di negara Berkembang*. Prisma No. 3, LP3ES: Jakarta.
- Dunn, W.N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Giarsi, G.G. 2001. *Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of Network, dalam Community Development Journal Vol.36 No.1 January 2001* pp 63-71, Oxford University Press.
- Goudzwaard, B. dan Lange, H. 1998. *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Kanisius:Yogyakarta.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real world*. Oxford University Press: London.
- House dan Ernest, R. 1980. *Evaluating with Validity*. Sage Publications: California.
- Huda, F.N. 2012. *Peran PNPM Mandiri Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta
- Huzein, F. 2013. *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi, Universitas Jember: Jember.
- Islamy, M. I. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kartasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Bappenas: Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2013.
- Kurniawan dan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. PEMBARUAN: Yogyakarta.

- Lineberry, Robert and Sharkansky, I. 1978. *Urban Politics and Public Policy*. Harper & Row: New York.
- Lester, James P., and Stewart Jr, Joseph. 2000. *Public Policy - An Evolutionary Approach*, Second edition. Belmont: Wadsworth – Thomas Learning.
- Lewis, J.P. dan Kallab, V. 1987. *Mengkaji Ulang Strategi Pembangunan*.
- Majone, G., and Wildavsky A. 1978. *Implementation as Evaluation, in Policy Studies Review Annual*. H. Freeman (ed), Sage, Beverly Hills, CA
- Martani dan Lubis. 1987. *Manajemen Modern*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mazmanian, Daniel, Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. HarperCollins: New York.
- Meter, Van, D. dan Horn, C.V. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Miles B, Matthew dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*. Mandar Maju: Bandung.
- Nakamura, R.T. dan Smallwood, F. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. St Martin Press: New York.
- Nasikun. 2000. *Globalisasi dan paradigma baru pembangunan pariwisata berbasis komunitas*, dalam Fandeli, C dan Mukhlison (eds). Pengusaha Ekowisata, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nugroho, D. R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- , 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Octaviani, D. 2001. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks*
- Panduan Teknik PNPM PISEW 2008.
- Parsons, W. 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 1973. *Implementation*. University of California Press: Berkeley and Los Angeles.
- Purwanto dan Atwi, S. 1999. *Evaluasi Program Diklat*. Setia LAN, Press: Jakarta.

Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publi* : Gava Media: Yogyakarta.

Putra dan Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*.
Pustaka Pelajar: Surabaya.

Ripley and Franklin. 1982. *Policy Implementation and Bureaucracy* Chicago.
Dorsey Press: Chicago.

Bibliography

Nama : Erwan

Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 21-September-1966

Agama : Islam

Isteri : Dra. Hj. Lis Sulastrini

Anak : 1. Yulinda Erlistyarini, S.IKom
2. Muhammad Zaki Erliyandi

Pekerjaan : 1. PNS Pemkab Tabalong
2. Dosen Khusus STIA Tabalong

Pendidikan : 1. SDN Pancasila
2. SMPN 1 Tanjung
3. SMAN 1 Tanjung
4. S1 IAIN Antasari Banjarmasin
5. S1 Fakultas Hukum
UNLAM Banjarmasin
6. S2 Magister Administrasi Publik
UNLAM Banjarmasin

Alamat Rumah : Jl. Belimbing Raya, RT-02, No.1,
Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalsel

Alamat Email : erwanmardani66@gmail.com